

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Paradigma terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus kian hari kian berubah dan mengalami perkembangan yang menggembirakan, perubahan ini ditunjukkan terutama dengan sikap yang positif baik dari pemerintah, sekolah, orang tua, siswa bukan berkebutuhan khusus, serta masyarakat luas. Hal ini ditunjukkan pemerintah dengan mengupayakan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, serta penerimaan oleh sekolah dan masyarakat sehingga anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai kebutuhan dan potensinya.

Perubahan dari pendidikan segregasi, integrasi hingga pendidikan inklusif merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam mencerdaskan bangsa. Pendidikan inklusif merupakan solusi sekaligus pembaharuan pendidikan yang cukup strategis dalam upaya mencerdaskan bangsa, pendidikan inklusif membantu mengentaskan program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah, menekan angka tidak naik dan tidak lulus, lebih-lebih pendidikan inklusif sebagai pelopor penghapusan diskriminasi terhadap perbedaan dan keragaman yang dimiliki oleh setiap peserta didik tanpa melihat perbedaan fisik, sosial, emosi, maupun kecerdasan dalam setting

sekolah ramah. Pendidikan inklusif memungkinkan anak dapat belajar di tempat yang dekat dengan lingkungan di mana mereka berada, anak dapat belajar bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya sehingga saling mengisi dan memberi arti, semua anak dapat terakomodasi tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun kondisi lainnya, kebutuhan belajar anak dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya. (Tim Pendidikan Inklusif Jawa Barat, 2003 4)

Pendidikan inklusif juga sebagai implementasi pemerataan hak warga negara atas perolehan pendidikan dan pengajaran yang layak Sebagaimana yang tertuang dalam UUD RI Tahun 1945 dengan jelas dan tegas menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, kemudian UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipertegas juga dengan Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Banyak sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif baik yang ditunjuk oleh pemerintah maupun dengan mengajukan sendiri. Dalam penyelenggaraannya, sekolah mengacu pada standar sekolah umum yang dikeluarkan oleh pemerintah di mulai dari standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, maupun standar penilaian, ditambah dengan pedoman-pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif, namun dalam penyelenggaraannya masih dapat menemui kendala-kendala di lapangan.

Pasal 1 Peraturan Menteri No. 70 Tahun 2009 berbunyi:

“Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”

Bunyi pasal di atas sering diartikan mengikut sertakan siswa dengan berkebutuhan khusus (kelainan) belajar bersama-sama siswa bukan kebutuhan khusus dalam sekolah reguler, pendidikan inklusif dipersepsikan sama dengan integrasi, sehingga anak yang menyesuaikan dengan sistem sekolah pada akhirnya anak berkebutuhan khusus diperlakukan sama seperti peserta didik lainnya

di sekolah tersebut, tanpa mendapat pelayanan yang khusus sesuai kebutuhannya.

Akibat dari pemahaman seperti yang diuraikan di atas timbullah permasalahan-permasalahan berkaitan dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah karena dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor kebijakan, politik maupun sosial budaya.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan permasalahan-permasalahan itu di antaranya: Ada kekhawatiran sekolah (kepala sekolah dan guru) apabila menerima ABK akan menurunkan reputasi sekolah mereka, tidak semua warga sekolah memiliki sikap positif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sehingga anak-anak berkebutuhan sering menjadi bahan olok-olok teman-teman lainnya, bahkan gurunya sendiri, sehingga terjadi bullying, masih ada sekolah yang masih pilih-pilih siswa dalam menerima siswa terutama siswa dengan kebutuhan khusus, masih ada juga sekolah inklusi yang belum menyediakan tenaga khusus di sekolah untuk menangani ABK sehingga siswa ABK harus mengikuti kurikulum yang digunakan untuk anak reguler pada umumnya, pembinaan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan belum mengarah pada pendidikan inklusif, kalau pun ada jumlahnya sangat terbatas, guru belum menyusun program pembelajaran individual berdasarkan identifikasi dan asesmen, selain itu belum jelasnya sistem penilaian yang cocok untuk menilai kemajuan hasil belajar siswa

ABK, pelaksanaan pembelajaran yang belum menggunakan dan memanfaatkan media, metode, dan lingkungan sebagai sumber belajar yang variatif untuk memenuhi perbedaan dan kebutuhan siswa yang berbeda-beda, guru belum melakukan koordinasi dan belum membentuk team teaching dalam proses pembelajaran, sekolah belum berkolaborasi dengan pihak lain atau tenaga ahli khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang berfungsi juga sebagai media konsultasi, advokasi, dan pengembangan SDM sekolah, sarana prasarana atau fasilitas sekolah belum mengakomodir seluruh siswa dengan keberagaman siswa yang ada di sekolah sehingga aksesibilitas kurang mendukung keberhasilan pembelajaran, perencanaan dan pengaturan pembiayaan sekolah yang belum berani memberi peluang dan anggaran lebih pada pemenuhan kebutuhan pendidikan inklusif, hubungan sekolah dengan pihak-pihak lain belum seluruhnya dijalin oleh sekolah terutama berkaitan dengan pendidikan inklusif, padahal hal ini sangat penting untuk bersama-sama meningkatkan pendidikan dan sosialisasi penerimaan ABK di masyarakat, hubungan yang bisa dijalin dengan pemerintah, orang tua, atau dokter, psikolog, dan pihak-pihak lain yang dapat bertanggung jawab terhadap pendidikan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Permasalahan-permasalahan yang muncul seperti yang dikemukakan di atas bila dikelompokkan menjadi permasalahan-

permasalahan sekolah dalam mengelola komponen manajemen sekolah dalam pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, pembiayaan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Permasalahan itu timbul akibat sekolah belum optimal dalam mengatur atau mengelola komponen-komponen tadi, sekolah belum merencanakan dengan matang apa, siapa, kapan, di mana, berapa, dan bagaimana setiap komponen itu dijalankan. Misalnya dalam mengelola kesiswaan, berapa siswa yang mau diterima, kriteria penerimaannya seperti apa, bagaimana penempatannya, siapa pengajar dan tenaga-tenaga lain yang ikut serta dalam mengajar, membimbing dan membina siswa, apa saja kegiatan yang akan diikuti siswa, kapan mereka belajar, kapan mereka mendapat bimbingan, bagaimana bimbingan konselingnya, fasilitas apa saja yang dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan belajar mereka, bagaimana penilaiannya, bagaimana pelaksanaannya, dan sebagainya. Begitu juga dengan komponen-komponen lainnya. Hal ini perlu dijalankan sekolah sesuai dengan fungsi manajemen sekolah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan karena segala sesuatu akan direncanakan sebelum dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan, diorganisasikan tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana tujuan itu dapat dicapai, diarahkan oleh pimpinan dengan pengaturan sumber daya yang ada, dan

keberhasilannya akan diawasi atau dikontrol sehingga meminimalisir penyimpangan.

Permasalahan-permasalahan di atas berkaitan dengan bagaimana sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memenej atau mengatur kurikulum sekolah pendidikan inklusif, pengaturan tenaga pendidik dan kependidikannya, pengaturan kesiswaan mulai dari penerimaan siswa, penempatan, dan aktivitas siswa, pengaturan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif mulai dari merencanakan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh sekolah, hingga pada pencatatan dan pelaporannya, perencanaan keuangan, penggunaan keuangan, dan pengawasannya, serta bagaimana sekolah menjalin hubungan dengan masyarakat dalam menunjang pendidikan unklusif.

Stakes dan Hornby dalam Weishaar dan Borsa (2001:15) mengutip tujuh isu yang menjadi factor pengontrol kemajuan pendidikan inklusif, factor yang ketujuh "*The last factor deals with management. Management has had difficulty in coordinating planning for regular education and special education. This lack of coordination continues to creat issues dealing with funding, curriculum, and staff delevpment.*" Weishar dan Borsa (2001:15) masih dalam buku yang sama mengutip yang dikemukakan Stainback dan Bray merangkum tujuh factor penting yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif, factor-factor tersebut adalah:

1. *Visionary leadership,*

2. *Collaboration,*
3. *Refocused use of assessment,*
4. *Support for staff and students,*
5. *Funding,*
6. *Effective parental involvement,*
7. *Curricula adaptation and adopting of effective instructional practice.*

Oleh karena permasalahan-permasalahan berkaitan dengan bagaimana sekolah mengelola komponen-komponen manajemen tadi, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, karena masih banyak sekolah yang tidak merencanakan kegiatan dan anggaran sekolah sehingga belum terarah dalam mencapai tujuan yang optimal, apa lagi berhubungan dengan memanusiakan manusia, hal ini sangat esensi. Penelitian ini akan berkaitan dengan manajemen sekolah terhadap fungsi-fungsi manajemen yang menyangkut perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) pada garapan manajemen 1) Manajemen Kurikulum, 2) Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan, 3) Manajemen Kesiswaan, 4) Manajemen Keuangan, 5) Manajemen Sarana Prasarana, dan 6) Manajemen Hubungan Sekolah dan



Masyarakat, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan seperti yang dikemukakan di atas.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 Pasal 51 ayat 1 menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Standar pengelolaan menurut PP No. 19 tahun 2005 adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi manajemen sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Meskipun banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang belum menjalankan sesuai dengan standar pengelolaan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, namun ada di antaranya yang sudah menjalankannya, di antaranya sekolah yang menjadi tempat penelitian penulis, dilakukan di Sekolah X di kota Bandung, yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak awal didirikannya mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, namun penelitian ini dilakukan hanya pada jenjang SMP saja. Sejak berdirinya Sekolah X sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menerima siswa dengan kebutuhan khusus sebanyak 21 orang dalam

tiga tingkatan dengan berbagai kekhususannya, sekolah juga memiliki tenaga khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, oleh karena itu penulis ingin lebih memperoleh informasi, gambaran, sekaligus menganalisis bagaimana manajemen sekolah dijalankan di Sekolah X sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

### **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sekolah merupakan organisasi yang dikelola dan dilaksanakan oleh berbagai komponen yang saling terkait dan menunjang satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Komponen-komponen tersebut bekerja dalam satu sistem sesuai dengan perannya masing-masing, dipimpin dan diarahkan oleh seorang manajer. Demikian juga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, untuk meningkatkan mutu pendidikan inklusif perlu adanya sistem pengelolaan yang sistematis, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terarah, terukur, dan terkontrol, oleh karena itu perlu dikembangkan suatu sistem manajemen yang dapat mendukung terhadap peningkatan mutu pendidikan inklusif dengan memberdayakan semua komponen manajemen sebagai strategi dalam peningkatan mutu pendidikan inklusif dengan garapan manajemen kurikulum, kesiswaan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, dan hubungan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas manajemen yang bagaimanakah yang sekiranya dapat mendukung kegiatan pendidikan inklusif yang akhirnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan sesuai harapan dan mencapai hasil yang optimal di suatu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan rumusan: **Bagaimanakah manajemen sekolah X dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif?**

Oleh karena begitu banyaknya masalah manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka dalam penelitian ini diperinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen kurikulum sekolah X sebagai penyelenggara pendidikan inklusif?
  - a. Bagaimana kurikulum dirancang dalam mencapai tujuan pendidikan?
  - b. Bagaimana kurikulum dilaksanakan agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan?
  - c. Bagaimana Pengelolaan proses pembelajaran?
  - d. Bagaimana evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam mengukur tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan?
2. Bagaimana manajemen tenaga pendidik dan kependidikan sekolah?
  - a. Bagaimana perencanaan dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah X?

- b. Bagaimana pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah X?
  - c. Bagaimana pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah X?
  - d. Bagaimana evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah X?
3. Bagaimana manajemen kesiswaan di sekolah X?
    - a. Bagaimana sistem penerimaan siswa baru, penentuan jumlah siswa, dan orientasi siswa baru?
    - b. Bagaimana pengelolaan bimbingan dan konseling siswa?
    - c. Bagaimana pengelolaan aktivitas siswa?
  4. Bagaimana manajemen keuangan di sekolah X?
    - a. Dari sumber mana saja dana itu diperoleh?
    - b. Bagaimana perencanaan penggunaan dana?
    - c. Bagaimana evaluasi penggunaan dana tersebut?
  5. Bagaimana manajemen sarana dan prasarana sekolah X sebagai penyelenggara pendidikan inklusif?
    - a. Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana dalam menunjang pendidikan inklusif?
    - b. Bagaimana pengadaan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif?
    - c. Bagaimana inventarisir / pencatatan sarana prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

- d. Bagaimana penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?
6. Bagaimana manajemen hubungan sekolah X dengan masyarakat?
  - a. Pihak-pihak mana saja yang dapat bekerjasama dengan sekolah?
  - b. Bagaimana sekolah X menciptakan, membina dan memelihara hubungan dengan masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menggali, menghimpun, dan menganalisis informasi empirik penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah X sebagai dasar dalam menentukan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan sekolah pada umumnya dalam melaksanakan pendidikan inklusif dilihat dari tantangan yang dihadapi dan peluang yang dimiliki sekolah. Secara khusus penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang:

1. Manajemen kurikulum sekolah X sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.
2. Manajemen Tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah X
3. Manajemen kesiswaan sekolah X.
4. Manajemen keuangan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif

5. Manajemen sarana prasarana sekolah X sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.
6. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sekolah X sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah keilmuan tentang bagaimana implementasi pendidikan inklusif dijalankan dalam manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah, sebagai pemegang kebijakan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menentukan strategi pendidikan inklusif, khususnya pemerintah daerah kabupaten, atau dinas pendidikan.
- b. Bagi sekolah termasuk kepala sekolah dan guru, sebagai acuan dalam mengelola sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan

- inklusif dalam memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut.
- c. Bagi orang tua dalam menentukan pilihan pendidikan yang tepat bagi anaknya disesuaikan dengan kebutuhannya.
  - d. Bagi peneliti, menambah ilmu dan wawasan sebagai bekal dalam ikut serta menjalankan pendidikan inklusif di sekolah.

### **E. Definisi Konsep**

Penelitian ini dilandasi tinjauan teoritis dengan berbagai kajian teori yang digunakan sebagai landasan analisis dan pedoman dalam membahas hasil penelitian. Yaitu:

#### **1. Pendidikan inklusi**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengamanatkan tujuan dan fungsi pendidikan, termasuk sistem pendidikan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Dari undang-undang ini kemudian hadir berbagai peraturan tentang pendidikan, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup delapan (8) standar. Inti kebijakan ini adanya sistem pendidikan yang bersifat umum sebagai tolok ukur minimal kulaitas layanan pendidikan. Implementasi dari kebijakan tersebut diharapkan setiap layanan pendidikan dapat mencapai standar pelayanan minimal.

Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat anak-anak berbakat (gifted children), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994).

Pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar bagi semua anak, remaja dan orang dewasa yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rawan dan rapuh, terpinggirkan dan terabaikan. Prinsip pendidikan inklusif di adopsi dari Konferensi Salamanca tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (UNESCO, 1994)

Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, cultural, maupun bahasa, (Florian, 2008).

Atas dasar pengertian dan dasar pendidikan inklusi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang berusaha mengakomodasi segala jenis perbedaan dari peserta didik tanpa diskriminasi baik secara konseptual maupun paradigmatic.



Stainback dan Stainback (1990) dalam Wasliman, 2007 mengemukakan bahwa sekolah yang inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa dikelas yang sama. Sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi.

Pendidikan inklusif memiliki karakteristik bahwa pendidikan diperuntukan bagi semua dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa secara individu, dengan menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi peserta didik, pembelajaran dititik beratkan pada proses pembelajaran dengan berpusat pada anak dengan pendekatan komprehensif sehingga memberi kesempatan kepada setiap siswa, sehingga siswa memperoleh hak yang sama.

## 2. Manajemen Sekolah

Manajemen sering diartikan sebagai administrasi. Manajemen merupakan pengelolaan sumber daya yang dimiliki baik berupa manusia, mesin, uang, metoda material, dan pemasaran yang dimiliki sekolah dalam proses yang bekerja secara sistematis.

Ada banyak pengertian dan konsep yang disampaikan para ahli terkait dengan sistem manajemen pendidikan.

George R. Terry, 1964 dalam Wasliman, 2007 menyebutkan bahwa: *'management is distinct procees of planning, organizing, actuating, controlling, perfomed to determine and*

*accomplish stated objective the use of human beings and other resources.'*

Longenecker dan Pringgle (1981) masih dalam Wasliman, 2007 mendefinisikan bahwa:

Manajemen sebagai proses pengadaan dan pengkombinasian sumber daya manusia, finansial, dan fisik untuk mencapai tujuan pokok organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses pengaturan atau penataan dan cara kerja sumber daya manusia, material, dana, alat, dan metode dengan mengintegrasikan sumber-sumber yang semula tidak berhubungan satu dengan lainnya menjadi suatu sistem yang komprehensif dan integratif untuk mencapai tujuan usaha suatu organisasi, yaitu dengan menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian menjadi suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam proses pendayagunaan semua sumber daya secara efektif dan efisien disertai penetapan cara pelaksanaannya oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai filosofi tinggi. Ia harus dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Pada hakikatnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan performansi (kinerja) sekolah dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan, baik tujuan nasional maupun lokal institusional, (Ruhiat, 2010: 31).

### **3. Manajemen Sekolah dalam Pendidikan Inklusif**

Manajemen pendidikan inklusif merupakan proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi proses perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi pada sistem pendidikan inklusif yang menyangkut kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, pendanaan, sarana prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Stainback dan Stainback (1990) dalam Wasliman, 2007 mengemukakan bahwa:

Sekolah yang inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa dikelas yang sama. Sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi.

Oleh karena itu keterkaitan manajemen yang menyangkut kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, pembiayaan, serta hubungan masyarakat mutlak diperlukan dalam implementasi manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah “Penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individual maupun kelompok” ( Syaodih, 2010:60).

Metode deskriptif ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dengan kondisi apa adanya, yang

berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau baik kondisi individual maupun kelompok.

Metoda pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penggabungan dari ketiga teknik (triangulasi).

Untuk memperoleh data yang komprehensif maka dilakukan penelitian pada subyek penelitian yang merupakan komponen sekolah yaitu:

1. Kepala sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum
3. Wakil Kepala Sekolah Urusan kesiswaan
4. Wakil kepala Sekolah Urusan Sarana prasarana
5. Humas
6. Guru mata pelajaran
7. Psikolog
8. Tenaga Administrasi
9. Petugas perpustakaan
10. Koordinator Inklusi
11. Guru Khusus/HBT
12. Komite sekolah/orang tua